



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHAFIDATUL AMANAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 14074

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.032.500.000

1. Tanah Seluas 9940 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000
2. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 437 m2/300 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
4. Tanah Seluas 5915 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 269.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, YARIS HAIKERS YARIS1.5SCVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.400.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.124.794



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.365.524.794
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.065.524.794

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.